

Ikhtisar Webinar

Prospek Ekonomi Biru bagi Pemulihan Ekonomi Indonesia



Prospek Ekonomi Biru bagi Pemulihan Ekonomi Indonesia

26 September 2022 | 14.00 – 16.00 WIB

Webinar Prospek ekonomi biru bagi Pemulihan Ekonomi Indonesia dibuka oleh *Keynote Speaker* Makmur Keliat sebagai Penasihat Senior Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45). Kemudian, *webinar* ini menghadirkan empat narasumber, yaitu: (1) Budi Sulisty, Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); (2) Denny N. Sugianto, Direktur Sustainable Development Goals Center Universitas Diponegoro (SDGs Center UNDIP); (3) Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Profesor Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; dan (4) Endah Murniningtyas, *Co-Chair* Independent Global Scientist Global Sustainable Development Report (GSDR) 2019 serta dimoderatori oleh Sarah Ariantje, *News Anchor* dari CNN Indonesia.

Makmur Keliat membuka *webinar* dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam riset dan *webinar* ekonomi biru ini. Beliau menyampaikan bahwa ekonomi biru terkait dengan kehidupan bangsa Indonesia, di mana laut adalah pemersatu, bukan pemisah. Produktivitas ekonomi Indonesia juga bergantung kepada laut yang sehat. Tanpanya, kehidupan ekonomi Indonesia akan bermasalah. Diharapkan, riset kolaborasi LAB 45 dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) dan SDGs Center Universitas Diponegoro (UNDIP) bisa menjadi masukan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi laut.

Dalam *keynote speech*, Budi Sulisty menyampaikan bahwa ada berbagai tantangan yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2050. Penduduk dunia akan naik sepertiga kali lipat, begitu pula dengan kebutuhan protein yang pasti meningkat. Permintaan ikan juga akan mengalami kenaikan, sehingga Indonesia perlu menguasai kesempatan ini. Naiknya permintaan tersebut adalah peluang untuk mendorong perekonomian kita, meski terdapat eksternalitas secara ekologis. Maka dari itu, peluang dan tantangan tersebut berupaya diatasi dengan lima program utama sektor kelautan-perikanan dari KKP antara lain perluasan wilayah konservasi laut sampai 30%, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, budidaya berkelanjutan, pengelolaan berkelanjutan pesisir, dan penanganan sampah laut.

Perluasan wilayah konservasi laut sampai 32,5 juta hektare pada tahun 2030 dilakukan untuk memaksimalkan potensi ekosistem laut Indonesia sebagai spons karbon dunia dan menangkai degradasi lingkungan laut. Lalu, penangkapan ikan terukur menjadi 6 zona dilakukan dalam rangka menjaga stok ikan di Indonesia agar terus berkelanjutan untuk

generasi masa depan. Kuota tersebut dibagi menjadi tiga, untuk investor dalam dan luar negeri, domestik, dan penangkapan terbatas untuk kelestarian. Kuota nelayan untuk koperasi ada 35%, 64% untuk industri, dan 0,1% untuk perikanan lainnya, diawasi lewat sistem berbasis satelit. Nilai perputaran uangnya mencapai Rp406,99 triliun per tahun. Kemudian, sektor budidaya didorong agar Indonesia dapat merespons secara benar akan kenaikan kebutuhan protein dunia di masa depan, sekaligus mengurangi penangkapan ikan dan mengentaskan kemiskinan. Fokusnya diarahkan pada komoditas udang, kepiting, dan rumput laut. Wilayah pesisir juga akan dikelola secara berkelanjutan dalam rangka membentuk pemanfaatan tata ruang laut yang sesuai dengan daya dukung ekosistem. Terakhir, pengelolaan sampah laut dilakukan karena Indonesia adalah penyumbang sampah laut kedua terbesar. Manajemen sampah menjadi perlu agar jumlah sampah yang terbuang ke laut bisa berkurang lewat pemberian insentif kepada nelayan untuk mengutip sampah laut dan menciptakan nilai tambah dari sampah laut. Mewujudkan lima kebijakan tersebut memerlukan konsolidasi yang kuat di antara KKP, perguruan tinggi, dan masyarakat kelautan-perikanan.

Denny N. Sugianto memaparkan bahwa kolaborasi LAB45 dengan SDGs Center UNDIP dan PKSPL-IPB menemukan bahwa ekonomi biru di Indonesia memiliki urgensi tinggi sebagai sebuah konsep. Wilayah laut, garis pantai, dan potensi ekonomi biru kita besar sekali. Pemerintah sudah menyadari hal ini, tercermin dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan berbagai regulasi turunan yang sudah mengatur perihal ekonomi biru.

Di masa depan, ada tantangan terkait pengelolaan sumber daya, desain regulasi-kelembagaan yang belum sesuai, dan dampak disrupsi Covid-19. Kajian ini difokuskan pada sektor prioritas, desain kelembagaan, evaluasi regulasi, dan inovasi-teknologi. Penelitian ini menemukan bahwa sektor Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Wisata Bahari memiliki kontribusi tertinggi. Sementara, sektor berpotensi tinggi adalah budidaya perairan, pertambangan dan energi, serta industri jasa maritim. Terkait penyerapan tenaga kerja, sektor Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, dan Pariwisata menjadi penyerap terbesar. Realisasi dan kebutuhan investasi, dilihat dari *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR), ditemukan bahwa Wisata Bahari, Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya memiliki ICOR terkecil. Sehingga, prioritas 1 (jangka pendek) diberikan kepada Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, *Marine Based Food*, dan Wisata Bahari. Prioritas 2 (jangka menengah) diberikan kepada *Renewable Energy*, *Shipbuilding*, ESDM, dan *Emerging Future Sector*. Prioritas 3 (jangka panjang) diberikan untuk Bioteknologi Maritim serta Riset Maritim.

Desain kelembagaan yang diharapkan diambil dari perbandingan Indonesia dengan beberapa negara. Di Indonesia, tidak ada lembaga eksplisit yang ditunjuk untuk mengelola ekonomi biru, yang ada hanya koordinasi antar 16 kementerian/lembaga. Efektivitas pengelolaan dari desain kelembagaan saat ini menghasilkan capaian yang cukup baik, dilihat dari berbagai indikator keluaran berbagai kementerian terkait (KKP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi). Komparasi Indonesia dengan Vietnam, Thailand, dan India menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi biru Indonesia masih rendah, meski jumlah regulasinya sudah cukup banyak sampai tahun 2022. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga sudah cukup menjadi prioritas dalam pertumbuhan investasi ekonomi biru. Lalu, dari sisi teknologi-inovasi, kita masih tertinggal dibandingkan negara-negara pembanding. Untuk mengenjarnya, diperlukan adopsi *Artificial Intelligence* (AI) dan produksi masif. Dari sini, diproyeksikan bahwa di 2022 hingga 2024 akan terjadi perpindahan dari ekonomi biru stagnan dan ekologi biru rusak akan berpindah ke ekonomi biru Stagnan dan Ekologi Biru terjaga. Pada tahun 2024 hingga 2030, Indonesia mulai berpindah menuju ekonomi biru yang bertumbuh dan Ekologi Biru yang terjaga, hingga 2045 tercapai idealisme di kuadran kanan atas.

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menyampaikan bahwa terkait ekonomi biru, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa situasi Indonesia yang tidak pernah beranjak dari statusnya sejak tahun 1950-an, namun mulai membaik sejak Keluarga Berencana (KB) digulirkan pada era 1970-an. Akan tetapi, secara populasi, Indonesia tetap besar dan diperlukan penyiapan kesempatan kerja. Pola pembangunan yang Jawa-sentris perlu kita ubah menjadi pembangunan yang menyebar menuju Timur Indonesia. Ini penting, mengingat Indonesia menghadapi Bonus Demografi dengan Angkatan Kerja 60% dari populasi selama 2025-2030. Jadi, Indonesia tidak bisa terus fokus di ekonomi darat, dan perlu memperluas paradigma menuju ekonomi biru. Sejak dahulu, Indonesia adalah bangsa maritim, tetapi VOC mengusir kita. Sekarang Indonesia sudah merdeka sehingga ekonomi biru perlu ditangani dengan serius.

Lebih lanjut, tugas pemerintah baru ke depan ditentukan oleh Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) terakhir yang dibuat oleh Jokowi pada periode kedua ini. Oleh karena itu, ekonomi biru harus masuk sebagai konsiderans di situ. Jika tidak, maka kita menyalahkan potensi yang sudah disajikan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 di mana luas laut Indonesia meluas menjadi 200 mil dari landasan kontinen. Sejak saat itu, wilayah laut Indonesia menjadi yang terluas keempat

di dunia. Kenyataan geografi ini perlu ditangani dalam rangka memenuhi tuntutan demografi Indonesia. Perluasan kesempatan ekonomi ke wilayah Timur dan Utara memerlukan peranan ekonomi biru sebagai ujung tombak. Sampai sekarang, Indonesia belum memanfaatkan potensi ini dengan sebaik-baiknya. Padahal, *Exclusive Economic Zone* (EEZ) kita terbesar keenam di dunia. Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan secara demografis (kuantitas dan kualitas penduduk) agar pembangunan ekonomi biru di wilayah Indonesia bisa berlangsung secara tepat.

Secara praktikal, penduduk Indonesia perlu mulai digerakkan menuju pulau-pulau yang lebih sepi penduduk. Dari 17.000 pulau, baru sekitar 4.000 yang dipakai untuk kehidupan penduduk. Terlebih lagi, kebanyakan kota-kota besar terletak di wilayah Barat, dan jarang terdapat kota besar yang menghadap Samudra Pasifik dan Hindia. Hal ini perlu menjadi perhatian dari segi pertahanan maritim, terutama potensi terjadinya konflik yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. Wilayah gugusan kepulauan Indonesia memang damai, tetapi ke depan perlu mengusahakan pembangunan berbasis laut agar lebih kuat dan persebaran penduduk yang lebih merata. Dari pemerataan ini, distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antar pulau bisa lebih berkeadilan. Akhirnya, ekonomi biru menjadi penting dikembangkan agar *Sustainable Development Goals 2030* (SDGs 2030) dan pemerataan ekonomi menuju ke luar Jawa bisa tercapai.

Endah Murniningtyas memaparkan bahwa ada berbagai definisi untuk ekonomi biru, tetapi semuanya bermuara kepada kegiatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan sesuai dengan daya dukung ekosistem laut. Beliau sepakat dengan Dorodjatun bahwa ekonomi biru tidak hanya berbicara soal pemulihan, melainkan pula penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga ada ruang untuk penerapan itu terutama dalam rangka menangani kesenjangan ekonomi dan secara khusus di sektor hilir pengolahan dan *supporting industries* lainnya seperti pakan ikan. Serapan tenaga kerja lokal juga lebih dapat dikembangkan untuk mendorong pembangunan di wilayah Timur. Dari segi transportasi laut, kontribusinya masih rendah akibat kesenjangan Barat-Timur yang masih tinggi di Indonesia. Penerapan ekonomi biru memiliki potensi untuk menekan kesenjangan ini. Pembagian enam wilayah laut Indonesia dari KKP perlu sebagai tolak ukur unit analisis, sehingga tidak perlu mengukur wilayah Indonesia secara keseluruhan. Sayangnya, laut akan menjadi penampung polusi-

polusi darat ketika daya dukung ekosistem sudah tidak kuat lagi. Alhasil, kerusakan lingkungan darat juga akan merusak laut. Lebih lanjut, wilayah pantai yang menjadi pusat investasi juga akan bisa berkembang melampaui daya dukung alam sehingga berpotensi untuk menurunkan kualitas sumber daya pesisir di wilayah-wilayah tersebut. Maka dari itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan diperlukan koordinasi semua pihak (Sekolah Perikanan, KKP, dan lain sebagainya) untuk memperbaiki data lingkungan secara regional dan peningkatan pengawasan serta penegakkan hukum terkait lingkungan hidup. Terakhir, transformasi paradigma laut sebagai beranda, melalui ekonomi biru dan pengembangan teknologi-inovasi kelautan, perlu diperkuat kembali untuk mewujudkan visi Poros Maritim.

SESI TANYA JAWAB

Pertanyaan: Melihat perkembangan dari situasi ekonomi global terkini yang akan mempengaruhi kemampuan pemerintah terutama dalam aspek fiskal yang menjadi terbatas, bagaimana dampak kondisi tersebut terhadap prospek ekonomi biru ke depannya? Apakah mungkin semua asumsi dan juga materi yang telah dipaparkan tadi masih relevan atau mungkin justru perlu beberapa penyesuaian?

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti: Situasi perang Rusia-Ukraina yang berlarut-larut memicu disrupsi rantai pasok global yang mendorong inflasi dan membuat The Federal Reserve (*The Fed*) meningkatkan suku bunga secara masif di seluruh dunia. Penguatan suku bunga dan peningkatan kurs Dolar Amerika Serikat dapat menjadi beban bagi Indonesia dalam melakukan investasi dan pembangunan ekonomi biru, terutama bila infrastruktur dibangun dengan mengandalkan impor. Selain itu, masalah klasik dari ekonomi biru adalah *gestation period* yang sangat lama. Waktu efektifnya suatu proyek di laut selalu didahului oleh masalah teknis, seperti *investment opportunities study*, *pre-feasibility*, dan *feasibility study*. Saat proses pembangunan sering muncul *error factor* di tengah berbagai statistik yang tidak siap. Masalah ini diperparah dengan kurangnya sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang menekuni pembangunan laut secara khusus.

Denny N. Sugianto: Sebenarnya pertumbuhan ekonomi biru ini cukup menarik dan telah berkembang secara positif sampai sekarang. Namun, hal yang menjadi kelemahan Indonesia adalah belum terdapat lembaga yang dapat mengakomodasi dari parameter dari kesuksesan perkembangan investasi dan ekonomi makro, perkembangan ekosistem, dan kesejahteraan

masyarakat. Hal yang cukup menarik juga adalah peningkatan investasi UMKM dan sektor swasta dalam ekonomi biru ini cukup tinggi. Di tengah kapasitas fiskal pemerintah yang terbatas, menjadi penting bagi pemerintah untuk dapat berkolaborasi dengan pihak swasta dalam mengembangkan ekonomi biru ini. Dengan bertambahnya investasi swasta ini, pemerintah tinggal perlu memberikan naungan, sentuhan, dan kepastian terkait investasi dalam ekonomi biru.

Endah Murniningtyas: Meskipun dalam fiskal yang terbatas, masih ada ruang untuk melakukan perubahan-perubahan. Analisis kebijakan mesti dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah dan pelaku bisnis. Dengan *gestation period* yang panjang, kebijakan kita mesti diarahkan dalam jangka yang sangat panjang karena efeknya bisa jadi dirasakan 50 - 100 tahun ke depan. Kebijakan tersebut seperti mempersiapkan SDM dengan pengadaan akreditasi sekolah laut dan pelatihan armada-armada kapal.

Pertanyaan: Secara geografis dan juga spesifik di mana seharusnya pusat ekonomi biru di Indonesia? Apakah pemerintah perlu memberikan fokus yang lebih terhadap wilayah timur Indonesia saja?

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti: Dalam menentukan lokasi pembangunan, sangatlah sulit karena Indonesia merupakan negara yang sangat rawan akan bencana. Hal ini menyebabkan urgensi asuransi menjadi tinggi dan dengan naiknya suku bunga dapat menyebabkan biaya asuransi menjadi lebih mahal. Indonesia juga dihadapkan dengan fenomena perebutan wilayah pesisir, terutama daerah yang berhubungan dengan minyak dan gas alam. Penentuan lokasi pembangunan juga perlu mempertimbangkan adanya Arus Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), sehingga pembangunan tidak bisa ditempatkan sembarangan.

Endah Murniningtyas: Komponen ekonomi biru cukup banyak, sehingga tidak mungkin bisa menentukan satu pusat ekonomi biru saja. Semua akan kembali pada pertanyaan industri apa yang akan dibangun. Selanjutnya adalah aspek manusia di mana ekonomi biru akan berkembang sesuai dengan tempat manusianya itu tinggal. Tidak mungkin, misalnya memindahkan nelayan di Jawa ke Selayar. Memang bisa misalnya kita membangun pabrik di pulau kosong dan membawa manusia, tapi itu bukan yang kita harapkan. Ekonomi biru ini dibangun untuk manusianya juga dan bukan untuk membangun wilayah saja.

Pertanyaan: Bagaimana kaitannya dengan penurunan nelayan yang semakin turun dan juga untuk sektor ketenagakerjaan?

Denny Sugiarto: Untuk nelayan tangkap karena teknologi yang banyak digunakan memang alat-alat yang ada di dalam kapal sudah semakin canggih, sehingga hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja. Tapi tidak dipungkiri bahwa ketersediaan tenaga kerja masih menjadi hal yang penting. Selain itu, hal yang menarik adalah penurunan jumlah nelayan diiringi dengan tren peningkatan jumlah pembudidaya. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor budidaya perairan menjadi salah satu hal yang dapat dikembangkan. Fenomena ini menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk terjun ke sektor tersebut.



Jl. Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.



Senin, 26 September
2022

➔ +62811452045

➔ lab45@lab45.id

➔ www.lab45.id